



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Aula Pendopo Kantor Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

Xxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, beralamat di Godang RT.01 RW. 01 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan, sebagai PEMOHON I;

Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Buruh, beralamat di Godang RT.01 RW. 01 Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan, sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 01 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, dengan register Nomor 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 18 Agustus 1985 di Sijambu Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan, dengan wali nikah ayah kandung

Hal. 1 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Abdul Halim bin Abdulloh dengan mahar berupa Rp. 5.000 dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Kyai Hisyam dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, beragama Islam ;

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;

5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- 1) xxx, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 12-06-1986;
- 2) xxx, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 03-12-1992;

6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini

Hal. 2 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada KUA Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :-----

1.-----
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dan Pemohon II (Xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Agustus 1985 di Sijambu Desa Panninggaran Kecamatan Panninggaran Kab. Pekalongan;

3.-----
Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Panninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4.-----
Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :-----

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :--

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alwi (Pemohon I), nomor : 3326021211640001 tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhimah (Pemohon II), nomor : 3326024903660001 tanggal 24 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 450/NTCR/0131/II/2018 tanggal 20 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 098/Kua.11.26.11/PW.01/2/2018 tanggal 21 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alwi nomor 3326021406070121 tanggal 11 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Setelah surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup (dinazegelen) lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5)

Bahwa, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :-----

- 1.-----
Xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya

Hal. 4 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga;

Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Agustus 1985 di rumah Pemohon II di Sijambu Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan;

Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tahu dan yakin mereka adalah suami istri sah;

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai Hisyam, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halim bin Abdulloh;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 dibayar tunai;

Hal. 5 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21
sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 dan
keduanya beragama Islam;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing
tidak mempunyai isteri atau suami;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah
maupun sesusuan dan semenda;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri
Pemohon I;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II
berlangsung tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau melaporkan
bahwa mereka bukan suami isteri;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah
bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA
Paninggaran;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2
(dua) orang anak;

Hal. 6 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

2.

Xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga;

Bahwa maksud kedatangan Para Pemohon ke persidangan adalah untuk mengurus permohonan pengesahan nikah;

Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah sebagai suami istri

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 18 Agustus 1985 di rumah Pemohon II di Sijambu Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan;

Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi tahu dan yakin mereka adalah suami istri sah;

Hal. 7 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kyai Hisyam, sedangkan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halim bin Abdulloh;

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 dibayar tunai;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dalam usia 21 sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 dan keduanya beragama Islam;

Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak mempunyai isteri atau suami;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan semenda;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak ketiga yang menggugat atau melaporkan bahwa mereka bukan suami isteri;

Hal. 8 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam sampai sekarang;

Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Paninggaran;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan serta mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 22, sebagaimana telah

Hal. 9 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama **secara Absolut** berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada 18 Agustus 1985 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halim bin Abdulloh dengan dihadiri saksi-saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx serta maskawin berupa uang sebesar Rp. Rp. 5.000 tunai dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Kajen dalam sebuah penetapan, dan selanjutnya penetapan dimaksud akan digunakan untuk mengurus akta nikah dan akta kelahiran anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P. 5 dan 2 (dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2 dan P.5 maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi

Hal. 10 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kajen, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5. membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada 18 Agustus 1985 dan pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Para Pemohon masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di Sijambu Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan pada 18 Agustus 1985 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halim bin Abdulloh, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 5.000 tunai. Pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i. Selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut. Selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi; -----

Hal. 11 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansial (materil), ternyata keterangan saksi-saksi tersebut antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, karenanya keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut : -----

bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada 18 Agustus 1985 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Halim bin Abdulloh, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, serta dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. Rp. 5.000 tunai; -----

bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19, serta antara mereka tidak ada halangan hukum untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i; -----

bahwa selama perkawinan tersebut berlangsung Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut; -----

bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1) Muhamad Zulkifli, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 12-06-1986;

Hal. 12 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Muhamad Romli, laki-laki, lahir di Pekalongan pada tanggal 03-12-1992;;

bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak-anak
anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kajen menyatakan sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon pada 18 Agustus 1985 di Sijambu Desa Panninggaran Kecamatan Panninggaran Kab. Pekalongan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ljab kabul serta syarat perkawinan yaitu adanya mahar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga tidak ditemukan adanya halangan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syariat agama Islam sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf a sampai f dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama Islam;-----

Hal. 13 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab:-----

1. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 298:-----

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pernyataannya, maka tetaplah pernikahan itu;*

2. Tuhfah, Juz IV, halaman 133:-----

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor : DII/2/HK.03.4/2860/1989, tanggal 02 Agustus 1989 serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut belum memperoleh Akta Kenal Lahir setelah lebih dari 60 hari, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi

Hal. 14 dari 16 hal.

Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalam petitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1985 di RT Sijambu Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran Kab. Pekalongan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1439 Hijriyah oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 15 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Dra. Hj. Z. HANI'AH

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 0,-
2	Biaya Proses	Rp. 0,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4	Materai	Rp. 0,-
5	Redaksi	Rp. 0,-
	Jumlah	Rp. 0,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Pengadilan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. Mashuri

Hal. 16 dari 16 hal.
Penetapan No 0050/Pdt.P/2018/PA.Kjn.